

**PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH,
TINGKAT KETERGANTUNGAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN
BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH YANG DIMODERASI OLEH KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN TAHUN 2007-2021**



**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

DIAJUKAN OLEH:

NAMA : DWI RISKI RAHMADHANTY

NIM : 127212020

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

GUNA MENCAPAI GELAR

MAGISTER AKUNTANSI

2024

TANDA PERSETUJUAN TESIS

NAMA : DWI RISKI RAHMADHANTY

NIM : 127212020

PROGRAM : MAGISTER AKUNTANSI

JUDUL TESIS : **PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIMODERASI OLEH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2007-2021**

Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 06 Desember 2024

Pembimbing



Dr. Amrie Firmansyah, S.E., M.M., M.Ak., M.A., M.H.

TANDA PENGESAHAN TESIS

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN TESIS

N A M A : Dwi Riski Rahmadhanty

N I M : 127212020

PROGRAM STUDI : S.2 AKUNTANSI

JUDUL TESIS

PENGARUH TINGKAT KEMANDIRIAN PEMERINTAH DAERAH, TINGKAT KETERGANTUNGAN KEPADA PEMERINTAH PUSAT DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIMODERASI OLEH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2007-2021

Telah diuji pada sidang Tesis pada tanggal 10 Desember 2024 dan dinyatakan lulus dengan majelis pengujian majelis pengujian terdiri dari

1. Ketua : Herman Ruslim
2. Anggota : Amrie Firmansyah
Estralita Trisnawati



Jakarta, 10 Desember 2024

Pembimbing



Amrie Firmansyah

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim.

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Pengaruh Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Kepada Pemerintah Pusat Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2021” dengan lancar. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw teladan bagi insan di muka bumi. Penyusunan tesis ini diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk memenuhi syarat-syarat guna meraih gelar Magister Akuntansi.

Puji syukur Alhamdulillah penulis hanturkan atas kekuatan Allah Swt tesis ini dapat diselesaikan. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini terutama kepada:

1. Allah Swt atas rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini
2. Ibu Hayani S. Pd dan ayah Syawaludin selaku orang tua yang telah menjadi penyemangat terbesar dan terbaik dalam hidup dan yang telah memberikan dukungan tiada henti baik berupa moril dan materil kepada penulis.
3. Dr. Amrie Firmansyah, S.E., M.M., M.Ak., M.A., M.E., M.H. selaku dosen pembimbing tesis yang telah bersedia menjadi pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan, masukan, nasihat, dan motivasi dalam proses penyelesaian tesis penulis.

4. Seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah banyak memberikan ilmu, bantuan dan pelayanan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Jakarta, 06 Desember 2024



Dwi Riski Rahmadhanty

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti secara statistik mengenai pengaruh antara Pengaruh Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Kepada Pemerintah Pusat Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Dimoderasi Oleh Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2021. Analisis data penelitian dibantu dengan program software *Econometric Views* 12 (EViews). Dari hasil pengujian hipotesis terhadap 15 Pemerintah Daerah Pada Provinsi Sumatera Selatan Selama Tahun 2007-2021 mendapatkan hasil bahwa Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk variabel moderasi, Kualitas Laporan Keuangan memperlemah pengaruh negatif Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah dan Tingkat Ketergantungan Kepada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, namun Kualitas Laporan Keuangan memperkuat pengaruh negatif antara Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

This study aims to obtain statistical evidence regarding the influence of the Level of Regional Government Independence, Level of Dependence on the Central Government and Capital Expenditure on the Financial Performance of Regional Governments Moderated by the Quality of Financial Reports in the Regional Government of South Sumatra Province in 2007-2021. The analysis of the research data was assisted by the Econometric Views 12 (EViews) software program. From the results of hypothesis testing on 15 Regional Governments in South Sumatra Province during the 2007-2021 years, it was found that the Level of Regional Government Independence, Level of Dependence on the Central Government and Capital Expenditure had a negative effect on the Financial Performance of Regional Governments. As for the moderating variable, the Quality of Financial Reports weakens the negative effect of the Level of Regional Government Independence and the Level of Dependence on the Central Government on the Financial Performance of Regional Governments, but the Quality of Financial Reports strengthens the negative effect between Capital Expenditure on the Financial Performance of Regional Governments.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS.....	i
TANDA PENGESAHAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan dan Manfaat	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Tinjauan Pustaka	16
2.2 Perumusan Hipotesis.....	20
2.3 Kerangka Penelitian	29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Populasi dan teknik Pemilihan Sampel	30
3.3 Operasionalisasi Variabel dan Instrumen.....	31
3.4 Model Analisis Data.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	38
4.2 Hasil Analisis Data.....	39
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	50

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	64
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	65
5.3 Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------------	----

LAMPIRAN	71
----------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82
---------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Ringkasan Pemilihan Sampel.....	30
Tabel 4.1 Prosedur Pemilihan Sampel	38
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	40
Tabel 4.3 Hasil <i>Common Effect Model</i> (CEM).....	41
Tabel 4.4 Hasil <i>Fixed Effect Model</i> (FEM).....	42
Tabel 4.5 Hasil <i>Random Effect Model</i> (REM).....	43
Tabel 4.6 Hasil <i>Chow Test</i>	43
Tabel 4.7 Hasil <i>Hausman Test</i>	44
Tabel 4.8 <i>Lagrange Multiplier Test</i>	45
Tabel 4.9 Hasil Uji Multikolinearitas.....	45
Tabel 4.10 Analisis Regresi Data Panel.....	46
Tabel 4.11 Uji Hipotesis	47
Tabel 4.12 Hasil Uji Statistik T.....	48
Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Pengujian	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Penelitian	29
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Sampel Pemerintah Daerah Sumatera Selatan	71
Lampiran II Data Input Variabel Penelitian	72
Lampiran III Hasil Output Pengolahan Data	76
Lampiran IV Surat Pernyataan Keaslian Tesis	80
Lampiran V Hasil Uji Turnitin	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan penyediaan layanan pemerintah dan memperkuat transparansi pemerintahan daerah (Kiswanto dan Fatmawati, 2019). Undang-undang nomor. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Daerah tahun 2014 menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berfungsi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bersama masyarakat setempat dan dewan perwakilan rakyat, dengan mengikuti asas otonomi dan kewajiban mendukung. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945. Pasal 1 ayat (6) juga menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan sistem NKRI. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan. Sejak penerapan otonomi daerah, pemerintah pusat sebagai induk memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Noviyanti & Kiswanto, 2016).

Dengan adanya peraturan otonomi daerah diharapkan semakin besar pula peluang pemerintah daerah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan menjadi semakin mandiri dengan tidak bergantung dengan pemerintah pusat, dengan dapat mengelola kinerja keuangan dan rumah tangga mereka sendiri. Pengelolaan kinerja keuangan ini juga termasuk pengelolaan dana yang diberikan Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah, juga dana yang berasal dari pajak daerah yang dipungut dari rakyat yang digunakan untuk pembangunan dan tata kota di wilayah Pemerintah Daerah guna kesejahteraan rakyat. Tujuan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pemerintah Daerah ini mendukung fakta bahwa masyarakat seharusnya mengetahui penggunaan dana tersebut secara transparan. Transparansi yang diharapkan bukan hanya menunjukkan bagaimana dana publik tersebut dibelanjakan dan digunakan, namun juga bagaimana dana publik tersebut dapat digunakan secara efisien, efektif, ekonomis serta tepat guna.

Pemerintah daerah dituntut untuk transparan, berkredibilitas dan memiliki akuntabilitas dalam menjalankan fungsi keuangan dan berkinerja sebagai suatu entitas. Merujuk kepada teori keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen, dengan masyarakat sebagai principal, pemerintah mengelola anggaran keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Capaian pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah ini dituangkan dalam laporan keuangan yang dapat diakses masyarakat selaku principal. Oleh sebab itu laporan keuangan harus disusun dengan baik, lalu dipublikasikan pada setiap akhir periode. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah aspek yang esensial dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan publik dan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah diharuskan mengelola keuangan dengan asas otonomi yang luas dan penuh tanggung jawab untuk mendorong kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang RI, 2014). Meskipun penerapan otonomi daerah sudah berjalan, banyak daerah yang masih belum menunjukkan kinerja keuangan optimal. Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan bahwa ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat masih tinggi,

menandakan bahwa upaya kemandirian fiskal belum sepenuhnya berhasil (Badan Pemeriksa Keuangan, 2024).

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik seharusnya mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, termasuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Firmansyah et al. (2024) menyoroti bahwa meskipun PAD seharusnya menjadi sumber utama pendapatan, banyak daerah belum mampu mengelola dan memaksimalkan potensi ini secara efisien. Hal ini menjadi indikator bahwa perencanaan keuangan jangka panjang dan kemampuan inovasi dalam pengelolaan PAD masih lemah di berbagai daerah.

Kualitas laporan keuangan adalah tolok ukur penting dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau WTP yang timbul dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dinyatakan bahwa laporan keuangan sudah benar sesuai standar yang ada, pada gilirannya mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, penelitian Firmansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah gagal mencapai opini WTP. Kegagalan ini mengindikasikan adanya masalah dalam sistem pelaporan keuangan, seperti kelemahan dalam pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi. Kinerja keuangan tidak hanya diukur dari sekadar angka-angka, tetapi juga melalui konsistensi dan integritas pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Pencapaian opini WTP menjadi indikator seberapa baik pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya dengan transparan dan bertanggung jawab. Ketidakmampuan mencapai opini WTP menunjukkan tantangan signifikan dalam pengelolaan keuangan yang masih harus diatasi.

Laporan keuangan yang berkualitas berkontribusi pada perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik di pemerintahan. Kualitas laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai indikator akuntabilitas, tetapi juga berperan dalam menumbuhkan kepercayaan publik dan mendukung evaluasi kinerja yang lebih objektif. Namun, data empiris menunjukkan bahwa pencapaian

kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang dikumpulkan dari masyarakat dan memberikan layanan publik yang optimal. Namun, ketika PAD masih rendah dan kurang memberikan dampak signifikan, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan masyarakat sebagai prinsipal. Oleh karena itu, kemandirian yang lebih besar diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada pusat dan memungkinkan pengelolaan yang lebih responsif sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, meskipun kemandirian finansial diharapkan meningkatkan kinerja keuangan, kondisi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa rendahnya PAD membatasi kemampuan daerah dalam mencapai kinerja optimal. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan strategi yang lebih efektif diperlukan untuk memperkuat kemandirian dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat daerah.

4.3.2 Pengaruh Tingkat Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas tingkat kemandirian pemerintah daerah pada tabel 4.12 yang menunjukkan nilai probabilitas $0,0397 < 0,1$ dengan nilai koefisien negatif sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut H_2 ditolak yang artinya variabel tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat pada penelitian ini diukur menggunakan Dana Alokasi Umum dibandingkan dengan Total Pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif yang dapat mengidentifikasi bahwa berapapun banyaknya dana yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat dapat mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan PAD. Ketika DAU terus mengalir, motivasi untuk mengembangkan pendapatan dari sumber-sumber lokal,

seperti pajak dan retribusi, sering kali berkurang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Nugraheni & Adi (2020) yang menyatakan bahwa ketergantungan pada dana pusat dapat melemahkan inisiatif daerah dalam mengelola sumber daya finansial secara mandiri. Dengan tingginya proporsi DAU dalam struktur pendapatan daerah, upaya untuk mengembangkan kapasitas keuangan lokal melalui PAD dapat terhambat, sehingga pemerintah daerah cenderung kurang efektif dalam pengelolaan anggaran mereka.

Penilaian kinerja keuangan daerah melibatkan penilaian seberapa efektif pemerintah daerah memenuhi sasaran anggaran, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan memberikan layanan publik yang berkelanjutan sebagaimana dinyatakan oleh Firmansyah dkk. (2024). Jika pemerintah daerah sangat bergantung pada dana pusat, kemampuan mereka untuk mengelola keuangan secara mandiri akan terbatas. Tidak adanya dukungan untuk inovasi, efisiensi, dan memaksimalkan sumber daya lokal dapat menyebabkan pengelolaan keuangan yang kurang efektif, sebagaimana diuraikan oleh Safitry dkk. (2021).

Hasil pengujian dalam penelitian ini sejalan dengan temuan dari Firmansyah (2024), Firmansyah et al. (2024) dan Ratnasari & Meirini (2022). Ketergantungan tinggi ini dianggap membatasi inisiatif pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, temuan ini mendukung perspektif bahwa daerah yang lebih mandiri secara fiskal cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan daerah yang sangat bergantung pada transfer pusat. Strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui penguatan PAD dapat menjadi solusi untuk mendorong kinerja keuangan yang lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memfokuskan upaya pada peningkatan PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer pusat agar tercipta pengelolaan keuangan yang mandiri, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

4.3.3. Belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas belanja modal yang tercantum dalam tabel 4.12, dimana nilai probabilitas $0,0000 < 0,1$ dan terdapat koefisien negatif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, hipotesis H3 ditolak, yang berarti bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal yang diukur dengan melakukan perbandingan terhadap total belanja pada penelitian ini diharapkan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerahnya. Hal ini dapat tercermin dari kinerja keuangan yang dapat lebih meningkat apabila kebutuhan akan belanja modal guna efektifitas pelayanan publik sebagai salah satu indikatornya dapat terpenuhi. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh jumlah pengeluaran pemerintah daerah terutama untuk keperluan belanja modal. Hasil pada penelitian ini dapat terjadi dikarenakan terdapat kemungkinan kurangnya dalam pemenuhan kebutuhan belanja modal guna menunjang kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah Sumatera Selatan dalam penelitian ini.

Temuan ini konsisten dengan penelitian Firmansyah (2024), yang juga menemukan bahwa alokasi belanja modal tidak memberikan kontribusi positif terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belanja modal diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pengadaan atau peningkatan aset yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang, alokasi tersebut ternyata tidak berhubungan langsung dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam kerangka teori keagenan, hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen mencerminkan harapan bahwa pemerintah daerah akan mengelola sumber daya dengan efisien dan transparan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (Azahari & Sulardi, 2021). Namun, ketika alokasi belanja modal dilakukan tanpa perencanaan strategis dan pengelolaan yang optimal, akuntabilitas pemerintah daerah sebagai agen dapat menurun. Ketergantungan pada belanja modal untuk proyek-proyek yang mungkin kurang

relevan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan dana publik.

Nuryani & Firmansyah (2020) juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengalokasian belanja modal. Mereka mengungkapkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dan transparansi yang tinggi membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya daerah. Dengan demikian, belanja modal yang tidak diarahkan pada proyek-proyek produktif atau yang tidak dikelola secara efektif dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menurunkan akuntabilitas pemerintah daerah. Pengelolaan belanja modal yang kurang efektif dapat mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan proyek yang kurang tepat sasaran, di mana belanja modal yang tidak meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akan gagal dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Oleh karena itu, meskipun belanja modal dialokasikan dengan harapan dapat memperbaiki pelayanan publik, hasil penelitian ini menekankan bahwa alokasi yang tidak tepat sasaran malah berpotensi menurunkan efisiensi pengelolaan keuangan. Dengan demikian, temuan dalam penelitian ini menunjukkan pentingnya perencanaan yang cermat dan evaluasi yang berkelanjutan dalam alokasi belanja modal. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap alokasi belanja modal benar-benar berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan dan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban alokasi anggaran.

4.3.4 Kualitas Laporan Keuangan memoderasi Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memiliki peran dalam memperlemah pengaruh negatif tingkat kemandirian pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan berfungsi sebagai faktor yang mengurangi dampak negatif. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas tingkat kemandirian pemerintah daerah pada tabel 4.12 yang menunjukkan nilai probabilitas $0,0506 < 0,1$ dengan nilai koefisien positif

sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut H4 diterima maka dapat dijelaskan bahwa variabel interaksi antara Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah (TKP) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) memperkuat pengaruh positif terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKP). Pada penelitian ini variabel interaksi antara Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah (TKP) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) memiliki pengaruh positif yang dilihat dari nilai koefisien, Dapat disimpulkan

bahwa Kualitas Laporan Keuangan (KLK) dapat memperkuat pengaruh Tingkat Kemandirian Pemerintah Daerah (TKP) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKP).

Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan berfungsi sebagai faktor yang mengurangi dampak negatif dari rendahnya tingkat kemandirian keuangan terhadap kinerja pemerintah daerah. Teori keagenan menggambarkan pemerintah daerah sebagai agen yang ditunjuk oleh masyarakat untuk mengelola sumber daya keuangan lokal secara efektif demi kepentingan publik (Nuryani & Firmansyah, 2020). Kemandirian keuangan daerah, yang tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), adalah indikator kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggarannya sendiri tanpa bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. PAD yang lebih tinggi seharusnya mendukung otonomi daerah dan berdampak positif pada kinerja keuangan, karena memberikan kontrol lebih besar dalam pengelolaan anggaran sesuai kebutuhan lokal.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa kemandirian memiliki pengaruh yang bersifat negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah atau PAD di beberapa daerah kemungkinan belum memiliki kekuatan yang cukup untuk memberikan dampak positif secara langsung. Dalam hal ini, kualitas laporan keuangan menjadi faktor moderasi yang krusial. Laporan keuangan berkualitas tinggi, misalnya melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari auditor, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, yang meningkatkan kepercayaan

masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap efektivitas penggunaan PAD, meskipun kontribusinya masih terbatas (Akrom & Firmansyah, 2017; Azahari & Sulardi, 2021).

Firmansyah et al. (2022) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas baik tidak hanya mendukung transparansi tetapi juga memitigasi kekurangan yang mungkin muncul akibat rendahnya kemandirian keuangan. Dengan adanya laporan keuangan yang andal dan akuntabel, masyarakat dapat lebih yakin bahwa pemerintah daerah menggunakan PAD secara efisien, yang berpotensi memperkuat kinerja keuangan meskipun PAD masih rendah. Sebaliknya, rendahnya kualitas laporan keuangan dapat memperburuk efek negatif dari rendahnya kemandirian, karena masyarakat mungkin meragukan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan memainkan peran moderasi dalam hubungan antara kemandirian dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kualitas laporan yang tinggi membantu mengurangi dampak negatif dari kemandirian yang rendah dengan meningkatkan kepercayaan publik dan transparansi, sehingga mendukung pemerintah daerah dalam mempertahankan kinerja keuangan yang lebih stabil dan akuntabel.

4.3.5 Kualitas Laporan Keuangan memoderasi Tingkat Ketergantungan kepada Pemerintah Pusat terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan mampu memperlemah dampak negatif ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat pada tabel 4.12 yang menunjukkan nilai probabilitas $0,0851 < 0,1$ dengan nilai koefisien positif sehingga berdasarkan hasil pengujian tersebut H_5 diterima maka dapat dijelaskan bahwa variabel interaksi antara Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat (TKPP) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKP). Pada penelitian ini variabel interaksi antara Tingkat Ketergantungan terhadap

Pemerintah Pusat (TKPP) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) memperkuat pengaruh positif yang dilihat dari nilai koefisien, Dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan (KLK) dapat memperkuat pengaruh positif Tingkat Ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat (TKPP) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKP).

Temuan ini menunjukkan bahwa, meskipun ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat cenderung mengurangi dorongan pemerintah daerah untuk mengembangkan pendapatan asli mereka, kualitas laporan keuangan yang baik dapat mengurangi dampak negatif tersebut. Ketika laporan keuangan daerah memiliki kualitas tinggi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pusat menjadi lebih terjaga, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan lebih efektif. Dalam konteks teori keagenan, hubungan antara pemerintah pusat (sebagai prinsipal) dan pemerintah daerah (sebagai agen) menjadi relevan. Ketika pemerintah pusat memberikan dana transfer, mereka berharap agar pemerintah daerah menggunakan dana tersebut untuk mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, ketergantungan yang tinggi pada dana pusat sering kali mengurangi insentif pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sendiri, yang pada akhirnya bisa berdampak pada kinerja keuangan yang kurang optimal.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berperan sebagai faktor moderasi yang penting. Dengan laporan keuangan yang berkualitas baik, yang ditandai dengan opini audit yang positif seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pemerintah daerah menunjukkan adanya upaya transparansi dan akuntabilitas yang kuat dalam pengelolaan keuangannya. Kualitas laporan keuangan yang tinggi berfungsi sebagai pengendalian internal yang mendorong pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dan memastikan bahwa dana yang diterima dari pusat digunakan secara efektif dan efisien. Akrom & Firmansyah (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan pemerintah

daerah, sehingga memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya mereka secara mandiri.

Terkait dengan hal tersebut, Firmansyah et al. (2024) mendukung temuan ini, bahwa pemerintah daerah dengan kualitas laporan keuangan yang baik cenderung lebih termotivasi untuk memanfaatkan dana pusat secara efektif dan berupaya mengurangi ketergantungan mereka pada dana eksternal. Kualitas laporan keuangan yang tinggi menciptakan mekanisme kontrol, di mana pemerintah pusat, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat memonitor pengelolaan dana dengan lebih mudah. Dengan demikian, kualitas laporan keuangan yang baik tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab dalam memanfaatkan dana pusat, yang pada akhirnya membantu meningkatkan kinerja keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kualitas laporan keuangan sebagai moderasi dalam hubungan antara ketergantungan pada pemerintah pusat dan kinerja keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik membantu pemerintah daerah untuk memanfaatkan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dengan lebih bertanggung jawab, sehingga menyeimbangkan dampak negatif dari ketergantungan yang tinggi.

4.3.6 Kualitas Laporan Keuangan memoderasi Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan memperkuat pengaruh negatif belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat yang tercantum dalam tabel 4.12, di mana nilai probabilitas $0,0526 < 0,1$ dan terdapat koefisien negatif. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, hipotesis H6 ditolak, yang menunjukkan bahwa variabel interaksi antara Belanja Modal (BM) dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKP). Dalam penelitian ini, variabel interaksi antara Belanja Modal (BM)

dan Kualitas Laporan Keuangan (KLK) menunjukkan pengaruh negatif, sebagaimana terlihat dari nilai koefisien. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan (KLK) dapat meningkatkan dampak negatif Belanja Modal (BM) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKP).

Dalam perspektif teori keagenan, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang ditugaskan oleh masyarakat (prinsipal) untuk mengelola sumber daya keuangan yang digunakan bagi kepentingan publik (Nuryani & Firmansyah, 2020). Sebagai agen, pemerintah daerah diharapkan mengelola belanja modal secara optimal dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mendukung kepentingan masyarakat. Kualitas laporan keuangan yang baik memainkan peran penting dalam memastikan transparansi ini, memberikan keyakinan bagi masyarakat bahwa pemerintah daerah mengelola dana publik dengan benar.

Penelitian Firmansyah et al. (2022) menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangannya lebih berkomitmen untuk menjaga pengelolaan keuangan yang akuntabel, termasuk dalam pengelolaan belanja modal. Kualitas laporan keuangan yang baik memungkinkan masyarakat dan pemerintah pusat untuk memantau alokasi belanja modal dengan lebih baik, yang mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana secara optimal. Menurut Yuniar & Firmansyah (2023), belanja modal yang diarahkan pada layanan publik utama memiliki pengaruh signifikan terhadap transparansi, yang tercermin dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selama periode 2007 hingga 2021, kabupaten/kota di Sumatera Selatan menunjukkan variasi dalam kinerja keuangan dan kualitas laporan keuangan mereka. Walaupun rata-rata kualitas laporan keuangan menunjukkan nilai yang baik, terdapat perbedaan yang cukup besar antar daerah, yang tercermin dalam statistik deskriptif. Variasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan di berbagai daerah. Kinerja keuangan daerah selama

periode tersebut juga mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya finansial mereka secara efektif. Meskipun belanja modal mencakup proporsi yang cukup besar dari anggaran, efektivitasnya dalam mendukung kinerja keuangan dapat berbeda tergantung pada kualitas pelaporan keuangan di masing-masing daerah.

Dengan demikian, kualitas pelaporan yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan alokasi belanja modal mereka secara lebih transparan dan meningkatkan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat lebih percaya pada pengelolaan keuangan yang dilakukan. Hal ini menyoroti pentingnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelaporan mereka agar belanja modal benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyaruddin, M., & Amrillah, M. F. (2018). Faktor penentu kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 471–468. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9028>
- Akrom, J., & Firmansyah, A. (2017). The moderating effect of audit opinion on the local government financial performances and the disclosure compliance of financial information. *AFEBI Accounting Review (AAR)*, 2(2), 68–82. <https://doi.org/10.47312/aar.v2i02.98>
- Anasta, L., & Ambarwati, V. (2023). Menganalisis program kinerja pada laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten dan Kota Serang: Studi Kabupaten dan Kota Serang 2017-2021. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 3(1), 31–36. <https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2219>
- Anisman, H. B. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pada pusat pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis*, 1(2), 77–90. <https://doi.org/10.35912/rambis.v1i2.408>
- Azahari, A. Y. P., & Sulardi, S. (2021). Pengaruh temuan audit, audit opini, dan ukuran daerah terhadap ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 21(2), 294–304. <https://doi.org/10.20961/jab.v21i2.655>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2024). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023*. <https://www.bpk.go.id/ihips/2023/II>
- Burhan, M., Kartini, K., & Said, D. (2022). Pengaruh kemandirian keuangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi. *Al-Buhuts*, 18(2), 296–310. <https://doi.org/10.30603/ab.v18i2.2946>
- Firmansyah, A. (2024). Kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia: belanja modal, tingkat ketergantungan dan ukuran daerah. *Jurnal Anggaran Dan*

- Keuangan Negara Indonesia*, 6(1), 1–13.
<https://doi.org/10.33827/akurasi2024.vol6.iss1.art194>
- Firmansyah, A., Arfiansyah, Z., & Huda, A. M. (2024). The characteristics and financial performance of local governments in Indonesia: The moderating role of financial health level. *Accounting Analysis Journal*, 13(2), 85–94.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v13i2.1894>
- Firmansyah, A., Yuniar, M. R., & Arfiansyah, Z. (2022). Kualitas laporan keuangan di Indonesia: transparansi informasi keuangan dan karakteristik pemerintah daerah. *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 4(2), 181–197. <https://doi.org/10.33827/akurasi2022.vol4.iss2.art180>
- Hutapea, H. L., & Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh good government governance dan ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah (studi pada pemerintah provinsi di Indonesia). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 173–186. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5446>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kamalia, A., & Firmansyah, A. (2024). Peran moderasi kepemimpinan dalam pengujian akuntabilitas kinerja pemerintah. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Manajemen*, 5(4), 311–325.
<https://doi.org/10.35912/jakman.v5i4.3228>
- Kiswanto, K., & Fatmawati, D. (2019). Determinan kinerja pemerintah daerah: ukuran pemda, leverage, temuan audit, dan tindak lanjutnya. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 3(1), 44–54. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i1.1689>
- Muhtar, M. (2022). Belanja daerah, kekayaan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah: studi empiris di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 8(1), 89–102.
<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/ap/article/download/8325/pdf>
- Munajar, A. (2019). *Ombudsman Sumsel terima 128 pengaduan masyarakat*. <https://www.antarane.ws.com/berita/1213348/ombudsman-sumsel-terima-128-pengaduan-masyarakat>

- Noviyanti, N. A., & Kiswanto, K. (2016). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah, temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Accounting Analysis Journal*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.15294/aaj.v5i1.9759>
- Nugraheni, E., & Adi, P. H. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah: studi meta analisis. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(1), 19–42. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i1.4398>
- Nugroho, T. R., & Prasetyo, N. E. (2018). Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Jawa Timur. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 27–34. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Nuryani, N., & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transparency in financial management on local government websites : evidence from Indonesia. *Humanities and Social Sciences Letters*, 8(2), 145–155. <https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.82.145.155>
- Peraturan Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5095/pp-no-71-tahun-2010>
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis kemampuan keuangan daerah terhadap kemiskinan: studi empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215–220. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>
- Putra, R., Wijayanti, R. R., & Ardhiarisca, O. (2020). Measurement of regional government financial performance in Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(1), 83–94. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.619>
- Ratnasari, D., & Meirini, D. (2022). Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan silpa dalam pengaruhnya kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 38–47. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6737>
- Safitry, H. A., Luhsasi, D. I., & Permatasari, C. L. (2021). Analysis of financial statement in assessing the financial performance of local government.

- Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 13(2), 65–71.
<https://doi.org/10.23969/jrak.v13i2.3955>
- Saputra, R., & Firmansyah, A. (2024). The impact of ethic and competence on audit quality (accountability as moderating variable). *Studi Ilmu Manajemen Dan Organisasi*, 5(2), 179–196. <https://doi.org/10.35912/simo.v5i2.3335>
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). Analisis laporan keuangan untuk menila kinerja keuangan pemerintah daerah. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 130–138. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Undang-Undang RI. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Wijayanti, Y., & Suryandari, D. (2020). The effect of regional characteristics, leverage, government complexity, bpk audit findings and opinions on local government financial performance. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 30–37. <https://doi.org/10.15294/aa.v9i1.22483>
- Yuliansyah, R., Wasif, S. K., Pratama, B., & Krisnando, K. (2023). Pengelolaan dana transfer dan saldo anggaran lebih terhadap belanja modal pemerintah daerah Jawa Barat. *Goodwood Akuntansi Dan Auditing Reviu*, 2(1), 13–25. <https://doi.org/10.35912/gaar.v2i1.2576>
- Yuniar, M. R., & Firmansyah, A. (2023). The transparency level of local governments in Indonesia: does the level of financial health matter? *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 123–150. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1195>